

LAPORAN KINERJA BAKORWIL MADIUN TAHUN 2014



BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN

Jl. Pahlawan No.31 Madiun

Telp. 0351-464151 Fax. 0351-457580

Email : info@bakorwilmadiun.jatimprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Bakorwil Madiun Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan melalui pengukuran kinerja Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan terlebih dahulu, semoga LKj ini bermanfaat khususnya untuk perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Madiun, 26 Februari 2015

KEPALA BAKORWIL MADIUN



SISWO HEROETOTO, SH,M.Hum,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580227 198503 1 007

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Wilayah Kerja.....	5
F. Permasalahan yang Dihadapi	5
G. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014	7
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	10
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Kinerja	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	15
C. Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	39
A. Permasalahan	39
B. Solusi	39
C. Kesimpulan	40
D. Saran	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Matriks Renstra Tahun 2009-2014	
2. Penetapan Kinerja Tahun 2014	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014	
4. Penghargaan/Prestasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terlegitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana Ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ditindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan telah disusunnya LKj Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun Tahun 2014 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memudahkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan serta dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun atau disebut Bakorwil Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKj adalah :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur berdasarkan pada pertimbangan bahwa :

- a. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten / Kota yang berpenduduk ± 37.687.622 juta jiwa dengan luas wilayah darat 47.157.71 km² dan luas laut 110.000 km² serta 216 jumlah pulau besar maupun kecil dengan kehidupan sosial budayanya yang beraneka ragam sehingga diperlukan span of control yang memadai.

- b. Untuk mendorong terlaksananya program Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota, perlu adanya lembaga yang memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan di daerah.
- c. Guna mewujudkan pengembangan ekonomi antar Kabupaten / Kota yang didasari pada karakteristik serta potensi unggulan dimasing - masing daerah dan keterpaduan program antar Kabupaten / Kota dalam satu kawasan , maka perlu dilakukan koordinasi dan fasilitasi secara optimal terhadap potensi sumber daya alam berupa pertambangan, pariwisata , agropolitan dan membuka akses untuk mengurangi disparitas wilayah yang saling berkaitan antara daerah satu dengan daerah lain yang pengembangannya perlu dikerjasamakan.
- d. Terjadinya masalah - masalah di perbatasan antar daerah, perlu adanya Lembaga yang memfasilitasi untuk penyelesaian perselisihan antar daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bakorwil Madiun adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur merupakan unsur pendukung Kepala Daerah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Jawa Timur.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

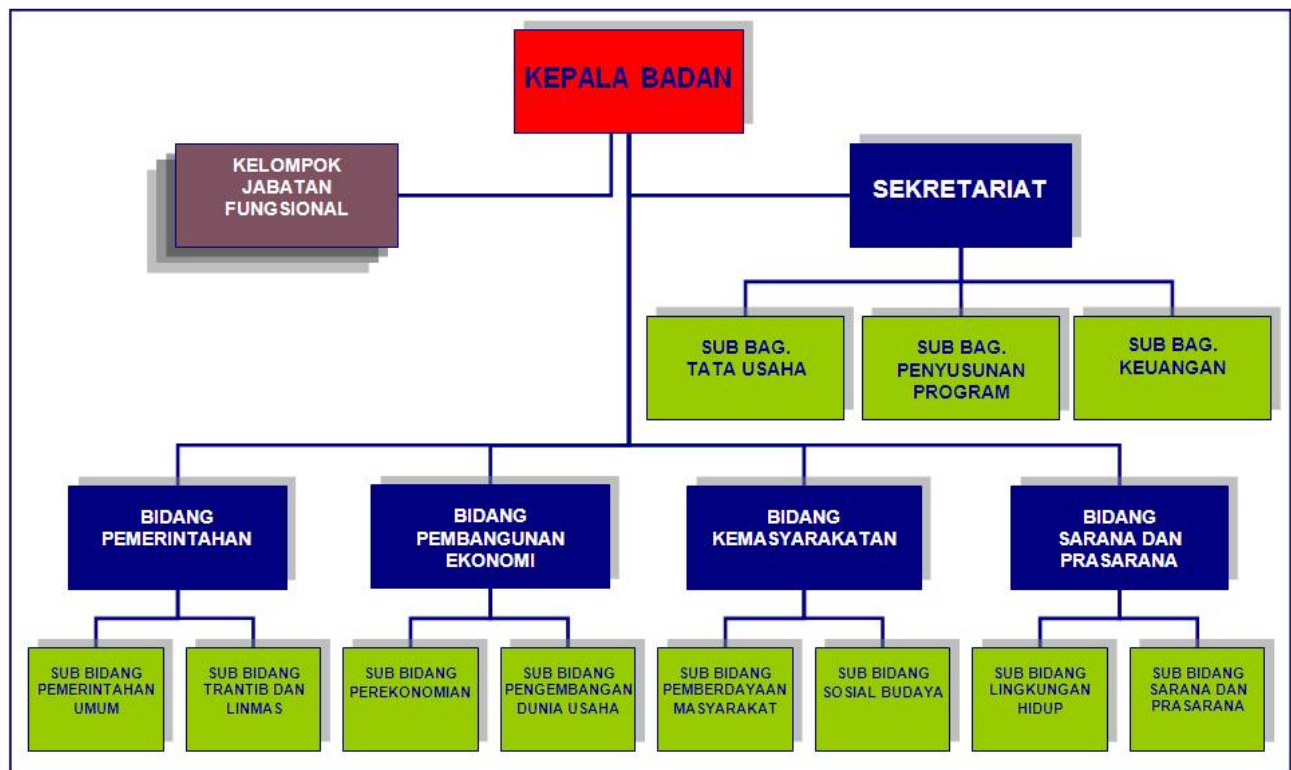
D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur, struktur organisasi Bakorwil Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi ;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - c) Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pemerintahan, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
 - b) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ;
4. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Perekonomian ;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha ;
5. Bidang Kemasyarakatan, membawahi;
 - a) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya ;
6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Lingkungan Hidup ;
 - b) Sub Bidang Fisik Sarana dan Prasarana ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Bakorwil Madiun selengkapnya diilustrasikan sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bakorwil Madiun



E. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Bakorwil Madiun meliputi 11 Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kota Madiun
2. Kabupaten Madiun
3. Kabupaten Magetan
4. Kabupaten Ngawi
5. Kabupaten Ponorogo
6. Kabupaten Trenggalek
7. Kabupaten Tulungagung
8. Kabupaten Pacitan
9. Kabupaten Blitar
10. Kota Blitar
11. Kabupaten Nganjuk

F. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bakorwil sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur

maka Terdapat beberapa Permasalahan Pembangunan dalam urusan “ Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian” sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penerapan tata kelola pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik;
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
3. Kurangnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bakorwil Madiun selama Tahun 2014. Capaian kinerja Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil Madiun Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum penyusunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun, struktur organisasi, wilayah kerja, permasalahan yang dihadapi dan sistematika penyajian;

Bab II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bakorwil Madiun Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengukuran tingkat pencapaian kinerja Bakorwil Madiun, hasil pengukuran kinerja, beserta akuntabilitas keuangan Tahun 2014.

Bab IV PENUTUP, menjelaskan permasalahan yang dihadapi, solusi perbaikan kinerja, kesimpulan menyeluruh dari LKj Bakorwil Madiun Tahun 2014 serta rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur, maka Bakorwil Madiun diberikan tugas untuk melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bakorwil Madiun menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Bakorwil Madiun berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014;
- 2) Penetapan Kinerja Tahun 2014

A. Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014

Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Bakorwil Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bakorwil Madiun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.

Penyusunan Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Secara ringkas substansi Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2009-2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi akan diarahkan, sehingga dalam hal ini Bakorwil Madiun dalam menyelenggarakan tugas pokok

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah, menetapkan Visi :

“Terwujudnya koordinasi, efektivitas dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

2. Misi

Misi adalah suatu usaha untuk mewujudkan tercapainya Visi organisasi, maka Bakorwil Madiun menetapkan Misi sebagai berikut :

“Meningkatkan keterpaduan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang hendak dicapai Bakorwil Madiun adalah :

“Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

Tabel 2.1 Hubungan antara Misi dan Tujuan

MISI		TUJUAN	
		Uraian	Indikator
1	Meningkatkan keterpaduan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti 2. Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bakorwil Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2009-2014), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Bakorwil Madiun adalah:

“Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
		Uraian	Indikator
1	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti 2. Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bakorwil Madiun selama ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain tidak dimilikinya kewenangan dan aksesibilitas hierarchi secara langsung dengan pemerintah Kabupaten / Kota serta terbatasnya sumberdaya secara kualitatif maupun kuantitatif, maka dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran digunakan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan tugas Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Sarana dan Prasarana di wilayah kerja Bakorwil Madiun;
2. Optimalisasi SDM aparatur dan peningkatan kualitas sarana/prasarana;

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk mengimplementasikan strategi pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya tujuan dan sasaran. Maka disusunlah kebijakan Bakorwil Madiun sebagai berikut:

1. Pendekatan formal melalui peningkatan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi secara berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Pendekatan informal melalui peningkatan hubungan silaturahmi dan kerjasama yang baik dan harmonis secara berkelanjutan dengan Bupati/Walikota, Anggota Forum Pimpinan Daerah serta Instansi vertikal yang ada di wilayah ;
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada staf untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan sesuai kompetensi yang dimiliki dan melakukan peningkatan / perbaikan sarana dan prasarana.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2014 Bakorwil Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2014

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	3
		2. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	38

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Rencana Kinerja Tahunan Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2014 menjadi tumpuan bagi Bakorwil Madiun untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bakorwil Madiun Tahun 2014 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Target kinerja yang ingin dicapai Bakorwil Madiun pada tahun 2014 telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Penetapan Kinerja Bakorwil Madiun Tahun 2014 dengan sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	3
	2. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	38

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2014 yang ingin dicapai, maka disusunlah program dan kegiatan dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian kinerja yang dimaksud. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum
Program dan Kegiatan
 - 1.1 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah
- 1.2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Banpol PP di Wilayah Kerja Bakorwil I Madiun
2. Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Program dan Kegiatan
- 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan peralatan Rumah Dinas/Jabatan
 - Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
- 2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2.4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur
- 2.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- In house/On Job Training
- 2.6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- Peningkatan, Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP)
- 2.7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Kinerja Urusan Pemerintahan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
- 2.8. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual
- Fasilitasi Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - Pasar Murah
 - Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana

2.9. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

- Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Pemerintahan Daerah
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Dampak Pemanfaatan SDA
- Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur
- Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan
- Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

2.10. Program Peningkatan Kerjasama

- Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Propinsi, Propinsi dengan Badan/Dinas/Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri
- Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil

$70 < X < 85$: Berhasil

$55 < X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2014.

Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2014 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bakorwil Madiun. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3	3	100%
	2. Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	38	38	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Bakorwil Madiun tahun 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Kinerja.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari Bakorwil Madiun pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

B.1 Indikator 1 : Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	3	3	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran pada Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Bakorwil Madiun pada tahun 2014 tergolong Sangat Baik (Capaian=100%). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai langkah untuk menindaklanjuti hasil koordinasi, Bakorwil Madiun telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil koordinasi ke Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun. Bakorwil Madiun akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya sehingga hasil capaian lebih maksimal lagi.

Pengkoordinasian penanganan keamanan dan ketentraman umum selama tahun 2014 dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan rapat koordinasi dan pemantauan di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik dari unsur TNI/POLRI, Badan/Dinas/Instansi Kabupaten/Kota, LSM, Ormas dan sebagainya. Koordinasi penanganan keamanan dan ketertiban umum Tahun 2014 yang ditindaklanjuti berupa kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengamanan Tradisi Tahunan Perguruan Pencak Silat di Bakorwil Madiun terutama pada saat tradisi halal bihalal dan tradisi nyekar pada Bulan Syuro (Muharram). Madiun sebagai pusat pencak silat yang dikenal dengan Bumi Pencak Silat, sering terjadi kerusuhan akibat dari perselisihan dan perkelahian antar anggota Perguruan Pencak Silat pada event tradisi tahunan sehingga mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat dan bahkan korban harta maupun jiwa yang sering tidak terhindarkan.

Peran Bakorwil adalah fasilitasi pengamanan Tradisi tahunan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan yang menimbulkan korban kerugian harta benda maupun jiwa.

Tindak lanjut Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Tradisi Tahunan tersebut yaitu pengamanan Tradisi Tahunan di lakukan oleh Jajaran Polri yang dipimpin oleh Polda Jatim dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten/Kota untuk mengamankan acara tradisi tahunan mulai dari awal sampai selesai acara. Sebelum acara pengamanan, terlebih dahulu diawali dengan gelar apel pengamanan oleh Polda Jatim dengan mengundang unsur TNI dan Satpol PP Kabupaten/Kota di halaman Bakorwil Madiun dengan Inspektur Upacara Kapolda Jatim.

Kegiatan koordinasi dan monitoring juga dilakukan Bakorwil Madiun pada saat menjelang hari besar keagamaan yaitu Natal, Idul Fitri dan sebagainya serta Tahun Baru.

2. Koordinasi, pembinaan dan pelatihan kesamaptaan Banpol PP Bakorwil Madiun dan UPTD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota Madiun.

Peningkatan SDM Banpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam penanganan keamanan dan ketertiban internal harus dilakukan secara terus-menerus sehingga SDM Banpol PP mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya, untuk itu Banpol PP harus loyal, tanggap, terampil, sigap, trengginas dan tangkas.

Bakorwil Madiun mengadakan koordinasi dan pembinaan Banpol PP bersama UPTD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota Madiun yang dilanjutkan dengan pelatihan kesamaptaan dan baris – berbaris dengan mengundang Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan TNI sebagai narasumber. Dengan kegiatan tersebut bertujuan agar Banpol PP mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, hal tersebut telah dibuktikan dalam pelaksanaan tugas rutin, mengikuti Jambore Satpol PP Provinsi Jawa Timur dan HUT Satpol.

3. Deklarasi dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan Islamic State of Irak and Syiria (ISIS) di Jawa Timur se-Bakorwil Madiun.

Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Larangan Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) di Jawa Timur telah memberikan wawasan sekaligus pemahaman yang tepat seluruh peserta dengan harapan mampu ditindak lanjuti di masing – masing Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun. Kegiatan tersebut elah ditindaklanjuti dengan Deklarasi penolakan dan menentang paham Islamic State Of Iraq

And Syria (ISIS) telah disepakati serta di tanda tangani oleh MUI Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun.

Indikator Kinerja “Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti” pada tahun 2011 ditargetkan 2 terealisasi 2 atau tercapai 100%, pada tahun 2012 ditargetkan 2 terealisasi 2 atau tercapai 100%, pada tahun 2013 ditargetkan 3 terealisasi 3 atau tercapai 100%, dan pada tahun 2014 ditargetkan 3 terealisasi 3 atau tercapai 100%.

Tabel 3.3 Capaian Indikator 1 Tahun 2011-2014

Indikator Kinerja	Capaian			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

B.2 Indikator 2 : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	38	38	100%

Berdasarkan hasil pengukuran pada Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Bakorwil Madiun pada tahun 2014 tergolong Sangat Baik (Capaian=100%). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran sebagian besar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai langkah untuk menindaklanjuti hasil koordinasi, Bakorwil Madiun telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil koordinasi ke Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun maupun lintas daerah (perbatasan dengan Jawa Tengah). Bakorwil

Madiun akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya sehingga hasil capaian lebih maksimal lagi.

Kegiatan pengkoordinasian penanganan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti dalam Tahun 2014 telah terlaksana dengan baik dan lancar dengan kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tindak lanjut
1.	Sosialisasi PP 46 Tahun 2011 dan Bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Bakorwil Madiun pada tanggal 3 Pebruari 2014	PNS Bakorwil Madiun mampu menyusun dan memahami SKP yang menjadi dasar penilaian prestasi kerja (SKP 2014)
2.	Penyusunan Database SKPD sebagai penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Update Pusat Data dan Website Bakorwil Madiun
3.	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Karyawan / Karyawati di Lingkungan Bakorwil Madiun Tahun 2014	Telah dilaksanakan dengan konsep pengembangan pegawai yang mampu membekali dan menyiapkan pegawai dengan pola pikir, sikap dan perilaku yang berkualitas, menggali ide – ide / saran masukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Bakorwil Madiun
4.	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bakorwil Madiun pada tanggal 12 Juni 2014	PNS Bakorwil Madiun mampu menyusun SKP yang menjadi dasar penilaian prestasi kerja
5.	Focused Group Discussion (FGD) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tanggal 25 Pebruari 2014	Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Gambaran umum kondisi daerah pada Kab/Kota se Bakorwil Madiun dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD Jawa Timur tahun 2014 – 2019 2. Inventarisasi matrik kesesuaian dengan RTRW Kab/Kota se Bakorwil Madiun dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD Jawa Timur tahun 2014 – 2019 3. Inventarisasi matrik identifikasi permasalahan pembangunan, usulan pemecahan dan isu strategis pembangunan pada Kab/Kota se Bakorwil Madiun dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD Jawa Timur tahun 2014 – 2019 untuk bidang Sosial,

		<p>bidang ekonomi dan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup.</p> <p>Bappeda Prov. Jatim melaksanakan Musrenbang RPJMD 2014-2019 yang sebagian bahannya bersumber dari hasil FGD RPJMD 2014-2019 tingkat Bakorwil</p>
6.	<p>Evaluasi SAKIP Bakorwil Madiun pada Tribulan I tanggal 1 April 2014 dan Tribulan II pada tanggal 14 Juli 2014 oleh Tim SAKIP Bakorwil Madiun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera dilakukan persiapan dengan menyiapkan dokumen SAKIP yang diperlukan dalam rangka menerima Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014. 2. Segera dibuat dan disusun Laporan Desember 2014 Tahun 2014 kegiatan Bakorwil Madiun. 3. Rangkaian kegiatan SAKIP segera ditindaklanjuti mulai dari penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA dsb), Pelaksanaan program dan kegiatan, Pelaporan dan Evaluasi. <p>Hasil evaluasi Tim SAKIP Prov. Jatim Tahun 2014, maka Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan kepada Bakorwil Madiun dengan nilai kategori B+</p>
7.	<p>Rapat Koordinasi Pembangunan Industri Pariwisata melalui Direct Promotion (MTF) Majapahit Travel Fair Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014</p>	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil Madiun secara umum telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan Promosi Wisata melalui MTF (Majapahit Travel Fair) yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 s/d 11 Mei 2014 di Hotel Grand City Surabaya; 2. Khusus untuk Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Pacitan yang belum mendaftar untuk mengikuti kegiatan Promosi Wisata melalui MTF (Majapahit Travel Fair) telah dilakukan pendekatan oleh PT. DEBINDO MITRA TAMA sebagai unsur penyelenggara agar dapat mengikuti event tersebut sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil Madiun dapat berpartisipasi mempromosikan wisata di daerahnya

8.	Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	<p>1. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pertandingan Bola Voly dan Tenis Meja, senam dan gerak jalan santai, upacara bendera serta kegiatan tasyakuran sebagai puncak acara peringatan hari jadi dengan melibatkan unsur UPT Provinsi Jawa Timur, unsur TNI/Polri dan BUMN/BUMD di Kabupaten/Kota Madiun;</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur TNI/Polri dan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Bakorwil Madiun telah berperan dan memberikan apresiasi positif terhadap pelaksanaan peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Bakorwil Madiun sebagai wujud kebersamaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di wilayah;</p> <p>3. Puncak acara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Bakorwil Madiun telah dilaksanakan kegiatan tasyakuran yang dikemas dengan hiburan Ketoprak Humor dan Campursari "KIRUN" Madiun dimaksudkan untuk mengangkat dan memberdayakan seni budaya lokal agar lebih dikenal serta diminati oleh masyarakat</p>
9.	Malam Kesenian dan Sarasehan Pengembangan Seni dan Budaya Mataraman sebagai Icon Bakorwil Madiun Tahun 2014	<p>1. Pertunjukan malam kesenian ditampilkan kesenian dari DIY meliputi Tari "Kebyar Batik" dan Tari Kolosal "Beksan Rengganis Widaninggar", sedangkan dari wilayah Bakorwil Madiun diwakili dari Kabupaten Magetan dengan Tari "Retno Wulandari" dan Kabupaten Ponorogo dengan Tari "Pujangganong" sebagai bentuk seni budaya yang berkembang di daerah wilayah mataraman saat ini</p> <p>2. Bedah buku "Rindu Pemimpin Kenabian" yang mengupas tentang sikap keteladan yang dilakukan salah satu Raja Mataram yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam perjalanannya sebagai seorang pemimpin Negara yang terbukti melakukan bentuk nyata pengabdian tanpa pamrih yang diharapkan</p>

		<p>menjadi inspirasi bagi para pemimpin negeri ini dalam mewujudkan jati diri budaya keteladanan sebagaimana dilakukan oleh para Raja Mataram</p> <p>3. Peserta sarasehan pengembangan seni budaya mataraman di Bakorwil Madiun sepakat dan setuju terhadap wacana Seni dan Budaya Mataraman sebagai Icon Bakorwil Madiun dan dibentuknya Paguyuban Budaya Mataraman, dimana Gubernur DIY (Sri Sultan Hamengku Buwono X) telah menyatakan kesediaannya sebagai penasehat paguyuban tersebut.</p>
10.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 serta Sosialisasi Program Raskin Tahun 2014	<p>1. Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2014, Sosialisasi Raskin Kabupaten/Kota, Penyaluran Raskin oleh Sub Divre Bulog dengan Sistem Pembayaran Cash and Charry untuk menekan tunggakan Raskin</p> <p>2. Memberi pemahaman yang sama dan adanya komitmen Pemerintah Daerah pada pelaksanaan dan pengelolaan Program Raskin Tahun 2014 sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan agar berjalan tertib, aman, lancar dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum Raskin yang telah ditetapkan</p> <p>3. Akan dilakukan monitoring penyaluran program Raskin tahun 2014 agar berhasil yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi</p>
11.	Sosialisasi SE (Surat Edaran) Gubernur Jatim tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Serta Woman Trafficking dalam rangka Pemulangan WTS Wanita Harapan "GUDE" Ds. Teguhan Kec. Jiwan Kab, Madiun	<p>1. Penutupan lokalisasi di Jawa Timur termasuk lokalisasi "Gude" Kabupaten Madiun merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanganan prostitusi dan Women Trafficking yang diharapkan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan tuntas pada Tahun 2014 guna mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan berakhlak sesuai visi pembangunan Jawa Timur yang tertuang pada RPJMD 2009 – 2014</p> <p>2. Telah dibentuk Tim Pemulangan WTS di lokalisasi wisma Wanita Harapan "GUDE" Ds. Teguhan Kec. Jiwan Kab, Madiun dengan SK</p>

		<p>Bupati Madiun tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 188.45/760/KPTS/402.031/2014</p> <p>3. Telah dilakukan deklarasi penutupan lokalisasi wisma Wanita Harapan "GUDE" Ds. Teguhan Kec. Jiwan Kab, Madiun oleh Bupati Madiun bersama pihak terkait pada tanggal 15 Nopember 2014</p>
12.	Koordinasi dan Inventarisasi Kerjasama Bidang Kesehatan Di Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2014	<p>1. Perlu adanya kerjasama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rawat jalan antar wilayah perbatasan;</p> <p>2. Pelayanan pada masyarakat miskin di wilayah perbatasan yang masih mendapat ketentuan BPJS, seharusnya bersifat Nasional;</p> <p>3. Penambahan tenaga, sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan.</p>
13.	Monitoring Realisasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober s.d 18 Nopember 2014	<p>1. Melaksanakan Program Raskin sesuai dengan Pedoman Umum dan Juknis yang ada, tingkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Program Raskin</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengalokasikan dana pendampingan (dana sharing) yang memadai melalui APBD Kabupaten/Kota untuk menunjang dan mendukung operasional Program Raskin sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan</p>
14.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perkembangan Program PUEM Tahun 2014	<p>1. Pelaksanaan PUEM tahun 2014 di Wilayah Bakorwil Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan laporan pertanggungjawaban</p> <p>2. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 di wilayah Bakorwil Madiun meliputi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pengembangan Pasar Desa secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada serta bantuan telah terealisasi 100%</p> <p>3. Program pendampingan telah mampu memberikan kontribusi positif dalam proses pelaksanaan berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 (PUEM, BUMDes, Pasar Desa) di wilayah Bakorwil Madiun</p>

15.	Koordinasi dan pemantauan berkaitan dengan kejadian bencana alam pada Kabupaten / Kota di Bakorwil Madiun pada tanggal 21-30 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun telah melaksanakan upaya deteksi dini penanganan bencana sesuai standart penanganan secara terkoordinasi dengan baik 2. Kejadian Aktual bencana khususnya di Kabupaten Pacitan baik bencana amblesnya badan jalan di Desa Tambakrejo Kecamatan pacitan telah ditangani langsung oleh PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (jalan Provinsi) sedangkan untuk tanah ambles di Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari telah dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait baik level Provinsi dan pusat diantaranya dengan pusat vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dihasilkan kepastian apakah dapat ditempati kembali atau harus direlokasi
16.	Rapat Koordinasi dalam rangka Kesiapsiagaan dan Optimalisasi Penanganan Kebencanaan Secara Terpadu se Bakorwil Madiun Tahun 2014 pada tanggal 7 Mei 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah terbentuk pada Kabupaten/Kota yang didukung dengan regulasi dan kebijakan terkait di daerah sebagai tindaklanjut dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 diharapkan dapat mewujudkan sistem penanganan bencana yang mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana yang ada di wilayah; 2. Perlu adanya pemahaman yang tepat terkait Badai El Nino, dimana untung dan rugi yang diakibatkan sangat tergantung dari kepentingannya baik bencana hidrologi, meteorologi maupun geofisika, dimana prediksi untuk Jawa Timur pada bulan Mei – Agustus memiliki trend El Nino lemah dengan suhu permukaan air laut hangat sehingga berpotensi penambahan uap air cukup signifikan yang dapat menguntungkan untuk sektor pertanian.
17.	Koordinasi dan Pemantauan terkait persiapan dan kesiapan dalam pelaksanaan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Timur Tahun 2015 pada tanggal 4-26 Pebruari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten/Kota diwilayah Bakorwil madiun secara umum telah siap untuk mengikuti rangkaian Kegiatan Pekan KIM Jawa Timur Tahun 2015 ; 2. Dalam rangka menghadapi Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) tingkat Bakorwil Madiun masing – masing daerah telah menyiapkan, Kelompok Informasi Masyarakat

		<p>(KIM) melalui Proses pembinaan yang telah dilaksanakan ;</p> <p>3. Untuk seni Pertunjukan Rakyat (Pertura) beberapa Daerah telah mrnyiapkan, namun sebagian daerah tidak dapat menamoilkan perturanya karena keterbatasan anggaran yang ada</p>
18.	Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) Tingkat Bakorwil Madiun dalam rangka Pekan KIM Jawa Timur Tahun 2015 pada tanggal 11 Juni 2014	<p>1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) Tingkat Bakorwil Madiun dalam rangka Pekan KIM Jawa Timur Tahun 2015 berjalan dengan lancar yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun;</p> <p>2. Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun secara umum telah siap dan akan mengikuti Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) Tingkat Bakorwil Madiun sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Timur yang ke VIII Tahun 2015</p>
19.	Koordinasi dan Inventarisasi Data Program SIPD Tahun 2014 (Data tabular SIPD Kabupaten/Kota) pada tanggal 9-13 Juni 2014	Rekapitulasi quisoner mengenai kendala teknis dan non teknis dalam proses pengumpulan data SIPD se Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun yang akan dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Bakorwil dan Provinsi
20.	Rapat Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis SIPD pada Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun Tahun 2014 pada hari Senin, 23 Juni 2014	Kabupaten/Kota mengupdate data dan informasi program SIPD agar penyediaan data dan informasi lengkap, tepat, akurat dan cepat sehingga akan memudahkan berbagai pihak yang membutuhkan data dan informasi tersebut terutama bagi Pemerintah yaitu untuk bahan dalam proses pembuatan keputusan yang efektif dan efisien
21.	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab/Kota se-Bakorwil Madiun Tahun 2014 pada tanggal 22 oktober 2014	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <p>1. Keterisian data dan informasi melalui program SIPD mempunyai arti yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk dasar perumusan pengambilan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah bahkan dapat digunakan untuk memproyeksikan ke depan tentang perkembangan suatu daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya peran dan tugas Tim Pengelola SIPD pada Kab./Kota se Bakorwil</p>

		<p>Madiun dalam mengumpulkan, mengolah dan mengisi data dan informasi SIPD Kab./kota serta mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten/kota</p> <p>Keterisian data SIPD pada Kab/Kota sebagai bahan masukan dan penyempurnaan pelaksanaan SIPD Tahun 2015</p>
22.	Koordinasi Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam (kegiatan pertambangan)	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi yang intensif dengan pengusaha tambang agar mengajukan Ijin Usaha sesuai aturan yang berlaku saat ini dan mengadakan sosialisasi agar penambang melakukan reklamasi setelah selesai melakukan kegiatan pertambangan
23.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pertambangan di wilayah Bakorwil Madiun, pada tanggal 28 Agustus 2014	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah - Penertiban ijin kegiatan pertambangan pada Kab/Kota oleh pihak terkait
24.	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg di Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari s/d 4 Pebruari 2014	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peran unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan lintas sektor terkait lainnya termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam HISWANA MIGAS perlu terus ditingkatkan ke arah kegiatan sosialisasi, pembinaan serta pengawasan yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran dan lancar khususnya pada daerah lintas batas antara Provinsi. 2. Bakorwil Madiun sesuai tugas pokok dan fungsinya akan meningkatkan perannya dalam rangka mengkoordinasikan serta memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2013 tentang

		Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur
25.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2014	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Adanya komitmen bersama dari Dinas/Instansi terkait dan Pelaku Usaha HISWANA MIGAS dalam pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi agar sesuai Kuota Wilayah Kabupaten/Kota tepat sasaran serta tidak disalahgunakan. 2.Mengantisipasi pengoplosan LPG 3 Kg bersubsidi ke LPG 12 Kg karena adanya perbedaan harga jual yang bisa merugikan masyarakat, maka perlu kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait yaitu Pertamina, Agen, Pangkalan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat hingga Aparat Kepolisian. 3.PT. Pertamina melakukan penataan Tata Niaga LPG 3 Kg bersubsidi tentang Rayonisasi Pemasaran Keagenan LPG 3 Kg bersubsidi yang menyatakan bahwa satu agen LPG 3 Kg bersubsidi hanya boleh menyalurkan LPG 3 Kg bersubsidi di satu wilayah Kabupaten/Kota. PT Pertamina juga melakukan pengawasan dan penindakan dengan memberikan sanksi kepada agen yang terbukti melanggar ketentuan
26.	Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Produk Unggulan UMKM dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang Berpotensi Ekspor Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 21 Mei 2014	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kerjasama dan membangun jejaring pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu disinergiskan melalui langkah koordinasi dan fasilitasi dari berbagai pihak yang terkait antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat menjalin kemitraan serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi pelaku usaha mencari pangsa pasar yang sesuai dengan pangsa pasar konsumen. 2.Peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi standarisasi SNI bagi produk unggulan berkualitas/potensi ekspor, sertifikasi produk makanan yang memenuhi

		standart persyaratan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan sertifikasi halal produk makanan yang bekerjasama dengan MUI, serta memfasilitasi/mengadakan pameran secara rutin untuk memperkenalkan hasil-hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada dunia usaha atau masyarakat luas baik dari dalam maupun luar negeri
27.	Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Kabupaten/Kota terkait ketersediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2014 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan mulai tanggal 7 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014	Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1.Sembilan bahan pokok di Wilayah Bakorwil Madiun tersedia cukup dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau oleh masyarakat. 2.Kenaikan harga sembilan bahan pokok tidak sama antara Kabupaten satu dengan Kabupaten lain yang ada di Wilayah Bakorwil Madiun dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran. 3.Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait di Kabupaten/Kota telah melakukan operasi pasar khusus di beberapa titik sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing daerah dengan komoditi yang dijual beras, minyak goreng dan gula pasir yang direspon secara positif oleh masyarakat. 4.Kenaikan harga komoditi sembilan bahan pokok dan barang pendukung lainnya di pasaran lebih disebabkan oleh musim panen dan kondisi yang biasa terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri namun tidak menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat.
28.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri "Sosialisasi Gerakan Aku Cinta Indonesia dan Gerakan Indonesia Menabung" di Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014	Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1.Sosialisasi Gerakan Gemar Menabung dilakukan untuk menghilangkan sifat konsumerisme di kalangan pelajar saat ini. Anak - anak dididik untuk berhemat dan memasyarakatkan/mengkampanyekan budaya menabung di Bank. Untuk meningkatkan minat pelajar supaya gemar menabung yaitu dengan memberikan pemahaman sebuah nilai uang dan memberikan pengertian akan

		<p>dampak buruk dari sifat konsumerisme yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya budaya Cinta Produk Indonesia dan budaya gemar menabung di Bank serta meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat.</p> <p>2. Layanan Keuangan Digital dibentuk untuk mempermudah transaksi atau layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan inklusif yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan sarana teknologi seperti perangkat mobile based maupun web based</p> <p>3. Bakorwil Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan meningkatkan perannya dalam rangka mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Gerakan Aku Cinta Indonesia dan Gerakan Indonesia Menabung serta menindaklanjuti Kampanye Gerakan Indonesia Menabung yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Februari 2010 bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</p>
29.	<p>Koordinasi Standarisasi Produk UMKM/IKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober s/d 4 November 2014</p>	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <p>1. Adanya mobilisasi pameran produk unggulan daerah, tidak di Kota - kota besar namun dilaksanakan di Kabupaten/Kota, dengan harapan Kabupaten/Kota di daerah dapat menampilkan produk - produk unggulan daerah dan untuk membangun jejaring usaha antar pelaku usaha sehingga dapat terjalin kemitraan antar Pemerintah, Pelaku Usaha/Swasta untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi antar Pelaku UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun secara terus menerus perlu dilakukan untuk meminimalisir egosektoral kedaerahan dengan harapan dapat meningkatkan daya saing produk unggulan UMKM/IKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.</p>

30.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2014	Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut : 1.Produk Unggulan UMKM Jawa Timur perlu dilakukan Standarisasi (Standar Nasional Indonesia/SNI) yang meliputi proses produksi,design/packaging,pemasaran/network serta Pengembangan Usaha yang meliputi pameran Dalam Negeri/Luar Negeri dan kerjasama dengan KBRI di Negara - Negara Berkembang untuk meningkatkan daya saing Pelaku UMKM di Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 2.Strategi khusus yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 antara lain Quick Bilateral Strategy yaitu melalui Peningkatan Standarisasi Produk melalui Laboratorium Standarisasi Keliling (Mobile Lab), Optimalisasi Produksi dan mendorong UMKM Champion untuk difasilitasi Ekspor. Sedangkan Quick Domestic Strategy yaitu melalui Peningkatan SDM (SMK Mini), Pameran Dagang ke Provinsi lain, Peningkatan Kualitas Barang, Optimalisasi Kantor Perwakilan Dagang (KPD), Efisiensi Logistik antar Pulau 3.Kerjasama antar Stakeholder (dunia usaha, perbankan, akademisi, birokrasi), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM daerah melalui Standarisasi Produk (Barang dan Jasa) UMKM.
31.	Rapat Koordinasi Persiapan Lomba Implementasi Budaya Baca melalui Uji Cerdas SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2014	Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut : 1.Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 tingkat Bakorwil Madiun ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014 di Ruang Rapat Lantai II Bakorwil Madiun dengan para juri yang telah ditunjuk dan disiapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur; 2.Kabupaten/Kota se wilayah Bakorwil Madiun secara umum telah siap untuk mengikuti

		<p>Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 tingkat Bakorwil Madiun, dimana 5 (lima) daerah telah menyerahkan resum buku kepada panitia lomba dan untuk daerah lain yang belum menyerahkan diberi kebijaksanaan menyerahkan resum buku tersebut paling lambat tanggal 2 Mei 2014 ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Hasil Lomba Uji Cerdas SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagai Juara 1 adalah SLTA dari Kab. Ponorogo</p>
32.	<p>Rapat Sosialisasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2014 di Kantor Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi</p>	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan sosialisasi program transmigrasi yang dilaksanakan secara tepat dengan pola pendekatan sosialisasi yang dilaksanakan pada daerah yang masyarakatnya berpotensi untuk mengikuti program transmigrasi diharapkan merupakan konsep pendekatan yang tepat dan efektif guna membangun minat masyarakat di wilayah tersebut untuk mengikuti program dimaksud; 2. Mendasari besarnya minat dan potensi yang ada di wilayah Bakorwil Madiun terkait pelaksanaan program transmigrasi seperti yang ada di Kabupaten Ngawi, dimana dari 550 KK yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi hanya sebanyak 150 KK yang direalisasi karena keterbatasan kuota, sehingga diharapkan adanya penambahan kuota sesuai kebutuhan untuk masing – masing daerah di wilayah Bakorwil Madiun.
33.	<p>Rapat Koordinasi dalam rangka pementapan HIPPA/GHIPPA di wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2014</p>	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka pelaksanaan lomba HIPPA/GHIPPA perlu disiapkan beberapa aspek yang menjadi ciri khas HIPPA/GHIPPA yang mandiri diantaranya kelembagaan yang memiliki legalitas dengan AD/ART dan program kerja yang jelas, teknis pengairan dan pertanian yang baik serta aspek keuangan dan usaha produktif yang diciptakannya;

		<p>2. Pada Tahun 2015 Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan fisik jaringan irigasi untuk HIPPA/GHIPPA di masing – masing Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat diakses melalui pengajuan proposal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan</p> <p>Hasil evaluasi HIPPA/GHIPPA tingkat Prov. Jatim Tahun 2014 untuk wilayah Bakorwil Madiun adalah :</p> <p>Sebagai Juara III : P3A "MAKMUR", Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek</p> <p>Sebagai Juara I : GP3A "TIRTO RUKUN" Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.</p>
34.	Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Lanud Iswahyudi sebagai Bandara Sipil/Komersial di Wilayah Bakorwil Madiun tanggal 3 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kepada Gubernur Jawa Timur 2. Proses kajian dan perubahan sehingga ada peluang bagi slot penerbangan sipil di Lanud Iswahyudi Magetan, agar wilayah Bakorwil I (BKPPW I) Madiun memiliki koneksitas udara secara Nasional dan Internasional yang sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah oleh pihak TNI AU.
35.	Rapat Koordinasi Persiapan penilaian Program Adipura Tahap I Tahun 2014-2015 di Wilayah Bakorwil Madiun yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kontinue dan berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Dinas teknis terkait pengelola lingkungan agar selalu berupaya meningkatkan kondisi fisik lokasi pantau baik kualitas maupun kuantitasnya 2. Sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya didalam melakukan kegiatan pengurangan, pemilahan dan pengolahan sampah dengan management Bank Sampah. 3. Meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas pengolahan sampah baik di sumber sampah, TPS maupun TPA 4. Pengembangan inovasi pengolahan sampah baik sampah padat, cair maupun gas baik di sumber sampah, TPS maupun TPA
36.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Hutan Rakyat dan Penyusunan Rencana Kehutanan	<p>Laporan kepada Gubernur Jawa Timur yang isinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah

	<p>Tingkat Kabupaten/ Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2014.</p>	<p>Bakorwil Madiun diharapkan mampu mewujudkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan menjamin kayu yang dihasilkan adalah legal. Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen, pemasok dan negara produsen serta memberantas illegal logging dan perdagangan kayu melalui pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>2. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan Program/kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan antara lain Anti Poverty Program (APP)/Program Anti Kemiskinan (porang, lebah madu, wana farma dan lain - lain), Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Desa Model Konservasi, Pemberdayaan Kelompok Usaha Produktif (KUP), Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produktif (PUMSHP).</p>
37.	<p>Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tema "Inflasi Yang Stabil dan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi Antar Pemerintah, BUMN dan Swasta Se Wilayah Bakorwil Madiun Dalam Rangka Penguatan Produk-Produk Unggulan Daerah" yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2014</p>	<p>1. Masing - masing Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota diharapkan menyusun program - program unggulan yang tertuang dalam Masterplan Pengendalian Inflasi Daerah.</p> <p>2. Dalam menghadapi pasar global perlu upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional menciptakan iklim investasi domestik dalam upaya penguatan pasar dalam negeri khususnya di Jawa Timur yang menjadi penyangga (Buffer) perekonomian regional maupun nasional, serta dengan memfasilitasi mempertemukan langsung pelaku usaha UMKM dengan pembeli (buyer) serta membangun jejaring usaha antar pelaku usaha.</p> <p>3. Banyak produk unggulan UMKM di daerah kurang memiliki daya saing di tingkat global</p>

		dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 dimana produk Luar Negeri bebas masuk wilayah Indonesia, maka diperlukan pendampingan/konsultan bagi para pelaku usaha UMKM agar produk unggulannya tidak kalah bersaing dengan produk dari Luar Negeri (feasable), diantaranya dengan mengadakan promosi/pameran produk unggulan UMKM dan pengenalan pelaku usaha UMKM terhadap produk perbankan (bankable).
38.	Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Timur di Bakorwil I Madiun yang dilaksanakan tanggal 7 April 2014 di Kantor Bakorwil Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Desk atau sidang kelompok masing – masing Bappeda Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi program secara langsung dengan masing – masing SKPD terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk disepakati bersama; 2. Usulan program kegiatan yang telah disepakati oleh Kabupaten/Kota dengan SKPD terkait Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam desk atau sidang kelompok akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja “Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti” pada tahun 2011 ditargetkan 38 terealisasi 27 atau tercapai 71%, pada tahun 2012 ditargetkan 39 terealisasi 29 atau tercapai 75%, pada tahun 2013 ditargetkan 38 terealisasi 31 atau tercapai 82% dan pada tahun 2014 ditargetkan 38 terealisasi 38 atau tercapai 100%.

Tabel 3.5 Capaian Indikator 2 Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja	Capaian			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah Koordinasi Penanganan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	71%	75%	82%	100%

C. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Pembiayaan selama tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana anggaran tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2014 Bakorwil Madiun menganggarkan belanja langsung sebesar Rp 5.538.836.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.375.669.902,00 atau 97,05% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.525.836.000	1.454.985.280	95,36%
1.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	296.740.000	274.917.302	98,05%
1.2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.229.096.000	1.164.028.334	94,71%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	418.000.000	409.582.248	97,99%
2.1	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	100.400.000	98.869.500	98,48%
2.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	317.600.000	310.712.748	97,83%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110.000.000	88.381.105	80,35%

3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110.000.000	88.381.105	80,35%
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50.000.000	47.403.734	94,81%
4.1	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	50.000.000	47.403.734	94,81%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95.000.000	91.180.698	95,98%
5.1	In house/On Job Training	95.000.000	91.180.698	95,98%
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	951.480.000	920.145.114	96,71%
6.1	Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kantor	531.480.000	503.186.400	94,68%
6.2	Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LKj)	240.000.000	239.075.696	99,61%
6.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah	180.000.000	177.883.018	98,82%
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	212000000	205243425	96,81%
7.1	Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	147.000.000	144.071.485	98,01%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kinerja Urusan Pemerintahan oleh Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat	65.000.000	61.171.940	94,11%
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	48.000.000	47.109.700	98,15%
8.1	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil I Madiun	48.000.000	47.109.700	98,15%
9	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual	300.000.000	296.902.904	98,97%

9.1	Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	200.000.000	197.955.532	98,98%
9.2	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana	100.000.000	98.947.372	98,95%
10	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan	1.155.000.000	1.146.428.574	99,26%
10.1	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pemerintahan daerah	170.000.000	168.328.200	99,02%
10.2	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah	110.000.000	109.327.659	99,39%
10.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Dampak pemanfaatan SDA	100.000.000	98.129.280	98,13%
10.4	Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur	200.000.000	199.664.650	99,83%
10.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur	100.000.000	99.904.420	99,90%
10.6	Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan	250.000.000	248.126.276	99,25%
10.7	Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	225.000.000	222.948.089	99,09%
11	Program Peningkatan Kerjasama	673.520.000	668.307.120	99,23%
11.1	Pemeliharaan Gedung Kantor	398.520.000	395.677.380	99,29%
11.2	Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Propinsi, Propinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri	150.000.000	149.852.550	99,90%
11.3	Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan	125.000.000	122.777.190	98,22%

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tahun anggaran 2014 Bakorwil Madiun menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp 4.302.255.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 4.104.293.285 atau 95,40 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.302.255.000	4.104.293.285	95,40%
1.1	BELANJA PEGAWAI	4.302.255.000	4.104.293.285	95,40%
1.1.1	Gaji dan Tunjangan	3.411.150.000	3.261.230.085	95,61%
1.1.1.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.537.254.000	2.475.617.000	97,57%
1.1.1.2	Tunjangan Keluarga	248.911.000	244.598.214	98,27%
1.1.1.3	Tunjangan Jabatan	218.789.000	197.590.000	90,31%
1.1.1.4	Tunjangan Umum	125.002.000	115.946.062	92,76%
1.1.1.5	Tunjangan Beras	200.609.000	172.310.560	85,89%
1.1.1.6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.539.000	55.129.209	91,06%
1.1.1.7	Pembulatan Gaji	46.000	39.040	84,87%
1.1.1.8	Uang Duka Wafat/Tewas	20.000.000	0	0 %
1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	891.105.000	843.063.200	94,61%
1.1.2.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	891.105.000	843.063.200	94,61%

BAB IV P E N U T U P

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Bakorwil Madiun adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran tugas koordinasi dan sinkronisasi antara Bakorwil Madiun, SKPD Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPD terkait) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Kurang terdeteksinya semua kegiatan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti.
3. Indikator kinerja kegiatan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi Bakorwil Madiun belum semuanya pada capaian hasil (outcome), tetapi masih sebatas pada keluaran (output).
4. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Bakorwil Madiun dalam melaksanakan tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya.

B. Solusi

Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun terutama dalam penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bersama Badan/Dinas/Instansi terkait
2. Melacak semua laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Badan/Dinas/Instansi terkait terhadap disposisi pimpinan sebagai tindak lanjut atas kegiatan tersebut.
3. Berupaya agar indikator kinerja Bakorwil Madiun sampai pada fungsi hasil (outcome) dengan memantau setiap tindak lanjut dan perkembangan dari suatu kegiatan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Bakorwil Madiun melalui Diklat, Bintek, Seminar, Kursus, dan lain-lain sehingga dapat membentuk PNS yang profesional.

C. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil Madiun Tahun 2014 ini telah menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil Madiun pada tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Bakorwil Madiun pada tahun 2014 dapat memenuhi target (capaian 100%) dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun

Sasaran: Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun

Indikator 1 : Jumlah Koordinasi Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (capaian 100%)

Indikator 1 : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti (capaian 100%)

3. Hasil evaluasi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi Bakorwil Madiun agar dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

D. Saran

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang diamanahkan kepada Bakorwil, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bakorwil sehingga dapat lebih efektif menjalankan tugas pokok dan fungsi Bakorwil.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja.

3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "top down" menjadi "bottom up" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta melihat perkembangan masalah-masalah aktual penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bakorwil Madiun perlu ditingkatkan untuk secara aktif mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

LAMPIRAN

**MATRIK RENSTRA
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN
TAHUN 2009 - 2014**

- VISI** : Terwujudnya koordinasi, efektivitas dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun
- MISI** : Meningkatkan keterpaduan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun
- TUJUAN** : Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun
- TUGAS** : Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun
- FUNGSI** :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan 1 : Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun

Satuan
246
kali

Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah Koordinasi Keamanan, Ketertiban Umum, Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2009	2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	
				Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	17	18
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1) Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	2	2	2	3	2	4		1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

		2) Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	38	38	38	39	38	40		<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual 5. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan 6. Program Peningkatan Kerjasama
--	--	--	---	----	----	----	----	----	----	--	---



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISWO HEROETOTO,SH,M.Hum,MM
Jabatan : Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. SOEKARWO
Jabatan : Gubernur Jawa Timur

Selaku atasan langsung dari pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Madiun, 30 Januari 2014

Pihak Pertama
KEPALA BAKORWIL MADIUN

SISWO HEROETOTO,SH,M.Hum,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19580227 198503 1 007

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
BAKORWIL MADIUN**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	3 kali koordinasi	<p>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah <p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil I Madiun 	<p>Rp. 180.000.000</p> <p>Rp. 180.000.000</p> <p>Rp. 50.000.000</p> <p>Rp. 50.000.000</p>
	2. Jumlah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	38 kali koordinasi	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - In house/On Job Training <p>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan, Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP) <p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Jadi Provinsi Jawa Timur - Fasilitasi Penyelenggaraan Kinerja Urusan Pemerintahan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat 	<p>Rp. 110.000.000</p> <p>Rp. 110.000.000</p> <p>Rp. 90.000.000</p> <p>Rp. 90.000.000</p> <p>Rp. 240.000.000</p> <p>Rp. 240.000.000</p> <p>Rp. 190.000.000</p> <p>Rp. 100.000.000</p> <p>Rp. 90.000.000</p>

			Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual	Rp. 550.000.000
			- Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Rp. 200.000.000
			- Pasar Murah	Rp. 250.000.000
			- Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana	Rp. 100.000.000
			Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan	Rp. 1.155.000.000
			- Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pemerintahan daerah	Rp. 170.000.000
			- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah	Rp. 110.000.000
			- Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur	Rp. 100.000.000
			- Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pengembangan UMKM di Jawa Timur	Rp. 200.000.000
			- Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan	Rp. 250.000.000
			- Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rp. 225.000.000
			Program Peningkatan Kerjasama	Rp. 275.000.000
			- Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri	Rp. 150.000.000
			- Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan	Rp. 125.000.000

Jumlah Anggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.525.836.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 362.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 110.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 50.000.000
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 90.000.000
6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 693.600.000
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 190.000.000
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 50.000.000
9. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual	Rp. 550.000.000
10. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan	Rp. 1.155.000.000
11. Program Peningkatan Kerjasama	Rp. 606.400.000
	<hr/>
	Rp. 5.382.836.000

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR



Dr. H. SOEKARWO

Madiun, 30 Januari 2014

Pihak Pertama
KEPALA BAKORWIL MADIUN



SISWO HEROETOTO,SH,M.Hum,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19580227 198503 1 007

**PENGUKURAN KINERJA
BAKORWIL MADIUN
TAHUN 2014**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2014	REALISASI				CAPAIAN (%)
					2011	2012	2013	2014	
1	2			5	7	8	9	9	10
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1. Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	3	2	3	2	3	100%
			2. Jumlah koordinasi pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	38	27	29	31	38	100%